

## **PESANTREN, ISLAM MODERAT, DAN ETIKA POLITIK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**

**Ismail**

STAI Nazhatut Thullab Sampang

yajlisismail@gmail.com

**Abstract:** *The existency of pesantren with all its variations is still needed in order to continue the struggle of Indonesian Muslim scholars who have pioneered the pesantren. Pesantren struggle not only in da'wah tarbawiyah, but also in other fields in the life of nation and state, to da'wah siyāsiyyah (political). Pesantrens are generating moderate Muslims that are urgently needed in the development of the nation and the country in the future, and pesantren equip their generation with strong competence and ethics based on Islam. The relationship between pesantren, moderate Islam, and political ethics is clearly visible from an educational perspective. Pesantren with its various educational and teaching models resulted in output generations of moderate Muslims, who uphold ethical values, which will accelerate the nation-wide development process in various sectors. The principal of political ethics in Islam is at least three things: (1) the political orientation of the amar ma'ruf nahi munkar, (2) the ethics of leadership, and (3) the ethics of government management.*

### **PENDAHULUAN**

Kajian tentang Islam dan politik dalam konteks Indonesia sangatlah menarik, karena Islam Indonesia memiliki karakteristik dan coraknya tersendiri; (1) Islam banyak pengikutnya, (2) kelengkapan ajaran Islam daam mengatur berbagai masalah kehidupan, dan (3) adanya toleransi dalam Islam.<sup>1</sup> M. Natsir mengatakan bahwa”

“Islam adalah satu falsafah hidup, satu *levens filosofie*, atau ideologi, satu sistem peri kehidupan, di sampingnya lain ideologi dan isme-isme. Ideologi ini menjadi pedoman bagi kita sebagai muslimin, dan buat itu kita tidak dapat melepaskan diri dari politik. Dan sebagai seorang berpolitik, tak dapat melepaskan diri dari ideologi kita, yakni ideologi Islam. Bagi kita menegakkan Islam itu tak dapat dilepaskan dari menegakkan negara, menegakkan kemerdekaan...”<sup>2</sup>

Dari itu dapat kita fahami bahwa pembahasan tentang Islam di Indonesia bergandengan dengan pembahasan tentang Indonesia itu sendiri sebagai sebuah bangsa dan negara, hal ini karena eratnya hubungan antara Islam dan Indonesia. Menurut Hilmy, memang pengintegrasian agama ke dalam tata negara bukan merupakan suatu hal yang tabu atau dilarang, sepanjang memiliki argumentasi dan rasionalisasi yang kuat. Dalam

---

<sup>1</sup> M. Rusli Karim, *Dinamika Islam Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial dan Politik* (Yogyakarta: Hanindita, 1985), 179.

<sup>2</sup> Ibid., 179-180.



hal ini, nilai-nilai agama yang dapat diadopsi ke dalam struktur kenegaraan adalah nilai-nilai etika yang dapat mengakselerasi pertumbuhan, seperti penghormatan terhadap nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesederajatan, kemanusiaan dan sebagainya.<sup>3</sup> Maka terjadilah konsensus di antara para tokoh-tokoh Islam dan para pejuang kemerdekaan dalam menyusun dan merumuskan konsep negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Karena apa yang dikehendaki oleh Islam tentang tatanan sosial-politik atau negara dan pemerintahan ialah apa yang dikehendaki oleh ide-ide modern tentang negara dan pemerintahan itu, yang pokok pangkalnya ialah, menurut peristilahan kontemporer egalitarianisme, demokrasi, partisipasi, dan keadilan sosial.<sup>4</sup>

Seiring dengan ulasan di atas, maka pembahasan tentang Islam di Indonesia selalu mengkaitkan dengan model atau sistem pendidikan dan dakwah yang dilaksanakan oleh cendekiawan muslim Indonesia, yakni pesantren. Pesantren adalah saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia, karena pesantren adalah sarana penting bagi kegiatan Islamisasi di Indonesia.<sup>5</sup> Pesantren merupakan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Peran pesantren dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan tidak terbantahkan, dari dulu hingga sekarang. Pesantren terus menunjukkan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa dan negara, dalam membangun bangsa dan negara.<sup>6</sup> Tidak sedikit bukti yang ditunjukkan oleh pesantren bahwa dirinya telah dan terus menerus memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. Bukti itu dapat kita lihat antara lain di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, politik, pembangunan, dan ekonomi.<sup>7</sup> Di bidang pendidikan, hingga saat ini, pesantren tetap eksis menjadi penyelenggara dan sekaligus unit pendidikan. Pendidikan di pesantren tidak hanya pendidikan keagamaan Islam, pendidikan sains dan teknologi pun juga menjadi garapan pesantren. Bahkan, pesantren juga menyelenggarakan perguruan tinggi dengan kajian yang variatif, dari kajian ke-Islaman, hingga sains dan teknologi.

Di bidang ekonomi, pesantren saat ini sudah banyak yang mengembangkan usaha-usaha produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Telah banyak pesantren yang membuka ritel, jasa keuangan, pertanian, maupun industri, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Begitu pula di bidang politik. Pesantren dengan alumninya menunjukkan kiprah positif dalam ikut serta membangun bangsa dan negara dalam ranah politik, baik praktis maupun pasif. Dari pesantren telah banyak lahir para politisi, yang berarti bahwa pesantren ikut serta menyumbangkan kader-kadernya untuk berkarya dan berkontribusi dalam pengelolaan bangsa dan negara. Dan di sinilah letak urgensi kajian tentang relasi pesantren, Islam moderat, dan etika politik ini untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang relasi tersebut.

<sup>3</sup> Masdar Hilmy, *Jalan Demokrasi Kita: Etika Politik, Rasionalitas, dan Kesalahan Publik* (Malang Jatim: Intrans Publishing, 2016), 36.

<sup>4</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Universal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 210

<sup>5</sup> Hanun Asrahah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 183.

<sup>6</sup> M. Rusli Karim, *Dinamika Islam Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial dan Politik...*, 139.

<sup>7</sup> Hanun Asrahah, *Sejarah Pendidikan Islam...*, 183.

## TINJAUAN TENTANG PESANTREN

Pesantren, dalam terminologi pendidikan Islam merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat pondok, masjid, pengajaran kitab Islam klasik, santri dan kyai.<sup>8</sup> Dari awal mula sejarah pesantren bagi umat Islam, memiliki beberapa fungsi dan peran, di antaranya adalah fungsi religius (*diniyyah*), fungsi sosial (*ijtimā'iyah*) dan fungsi edukasi (*tarbawiyah*)<sup>9</sup>, sedangkan fungsi lain dari pesantren dapat dilihat pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, menurut Kuntowijoyo, pesantren menjadi persemaian ideologi anti-Belanda<sup>10</sup>. Para kyai selalu menanamkan doktrin untuk menolak Belanda dan berjuang “*jihād*” membebaskan bangsa Indonesia dari Belanda. Sedangkan menurut Arif Subhan, tentang kapan pesantren mulai muncul sebagai lembaga pendidikan Islam Indonesia, tidak terdapat kesepakatan di kalangan para sarjana.<sup>11</sup> Namun, kiranya pertemuan budaya (*cultural encounter*) antara tradisi mendala<sup>12</sup>, desa *perdikan*<sup>13</sup> – sebagai tradisi lokal – ajaran wakaf<sup>14</sup>, ajaran Islam tentang *ṭalab al-‘ilm* dan tradisi pembelajaran Islam yang sudah berlangsung sejak awal perkembangan Islam, merupakan faktor yang mendorong proses pelembagaan (*institutionalized*) pesantren.<sup>15</sup> Sebagai lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah umum, perguruan tinggi) dan pendidikan nonformal.<sup>16</sup> Jadi eksistensi pesantren sebagai produsen kaum intelek terus berlanjut.

## KONSEP ISLAM MODERAT

Telah disepakati bahwa konsep Islam moderat merujuk pada istilah *ummatan wasaṭan*<sup>17</sup> dan atau *rahmatan lil ‘alamin*<sup>18</sup>. *Ummatan wasaṭan* di dalam ayat tersebut

<sup>8</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* – Edisi Revisi (Jakarta: LP3ES, 2011), 79-93.

<sup>9</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2006), 23.

<sup>10</sup> Ibid., 23.

<sup>11</sup> Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana, 2012), 79.

<sup>12</sup> Tempat pertapaan sekaligus pembelajaran bagi calon pendeta pada masa pra-Islam. Lihat Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana, 2012), 79.

<sup>13</sup> Desa *perdikan* merupakan desa yang mendapat perlakuan khusus (*privilege*) dari raja. Desa *Perdikan* memiliki tiga fungsi yaitu memelihara makam tokoh keagamaan, tempat pembelajaran dan masjid. Biasanya penghuni desa *perdikan* adalah pimpinan Islam dan pengikutnya. Lihat Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20....*, 79.

<sup>14</sup> Wakaf merupakan mekasmisme dalam Islam di mana seseorang, baik penguasa maupun orang biasa yang kaya secara ekonomi, mendermakan harta miliknya untuk kepentingan agama. Lihat Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia....*, 79

<sup>15</sup> Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Abad ke-20....*, 79

<sup>16</sup> Abasri, “Sejarah dan Dinamika Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara”, dalam Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 288.

<sup>17</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 143.





diartikan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>19</sup> Islam yang moderat itu adalah yang natural, ilmiah, dan siap untuk diaplikasikan dalam pergulatan hidup dan tentunya belum dimasuki interest-interest non agama.<sup>20</sup> Islam moderat yang mengedepankan kontekstualisasi sekaligus memperhatikan aspek tujuan moral dan etis, berkeyakinan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel dalam merespons perubahan zaman yang semakin kompleks. Lain halnya dengan Islam puritan lebih mengedepankan kekuatan teks sehingga terkesan kaku dalam menerapkan hukum.<sup>21</sup> Sehingga menurut Aboe el-Fadl, muslim moderat adalah Orang-orang yang yakin pada Islam sebagai keyakinan yang benar, yang mengamalkan dan mengimani lima rukun Islam, menerima warisan tradisi Islam, namun sekaligus memodifikasi aspek-aspek tertentu darinya demi mewujudkan tujuan-tujuan moral utama dari keyakinan itu di era modern.<sup>22</sup>

Dalam konteks Indonesia, *Ummatan wasaʿatan* dirumuskan oleh kalangan Nahdlatul Ulama dalam bentuk watak dan karakter NU sebagai organisasi (*jam'iyah*) dan komunitas NU (*jama'ah*), mempunyai sikap dalam interaksi sosio-kultural, yakni: *tawassuʿ* (moderat), *tasāmuḥ* (toleran), dan *tawāzun* (harmoni).<sup>23</sup> Dari sini kemudian lahir beberapa konsep dan pemikiran di kalangan NU, semisal, menerima Pancasila sebagai Dasar Negara, pemikiran Islam Nusantara dan lain sebagainya, yang pada intinya, Islam di Indonesia dibentuk menjadi sebuah agama yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, serta dapat menerima realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

## ETIKA POLITIK DALAM ISLAM

Mengenai etika politik, penulis ingin memulai dengan pernyataan bahwa istilah etika memiliki persamaan, dan tentu saja perbedaan pula, dengan istilah moral dan akhlak. Tetapi masing-masing istilah itu memiliki kekhasannya tersendiri. Tetapi kemudian penulis lebih menggunakan istilah etika dalam konteks ini, karena istilah etika lebih dapat diterima oleh siapapun dikarenakan etika dianggap lebih universal daripada moral yang bersifat lokal, maupun akhlak yang bersifat religius.<sup>24</sup> Dikatakan bahwa “*ethics is concerned with standard of conduct among people in social groups*” (etika memfokuskan diri pada perilaku di antara orang-orang dalam kelompok sosial dengan

---

<sup>18</sup> QS. Al-Anbiya'[21]: 107.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: al-Hidayah, 1998), 36.

<sup>20</sup> M. Zaidi Abdad, “Pemikiran Fiqih Moderat di Timur Tengah dan Relasinya dengan Gerakan Fiqih Formalis” dalam *Islamica*, Vol. 6, No. 1 September 2011, 106.

<sup>21</sup> Chafid Wahyudi, “Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl” dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1 Juni 2011, 88.

<sup>22</sup> Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Terj. Helmi Mustafa, Edisi ke-1, (Jakarta: Serambi, 2007), 130.

<sup>23</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunah Wal Jamaah* (Jakarta: Lantabora Press, 2005), vii.

<sup>24</sup> Asmaran AS., *Pengantar Studi Akhlak* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 9.



standar tertentu. “ethics is a systematic code of moral principles” (etika merupakan prinsip-prinsip nilai moral yang sistematis).<sup>25</sup>

Sedangkan tentang politik, penulis tidak akan mengulas berbagai macam pengertian yang diberikan oleh para ahli yang banyak dan variatif, penulis hanya ingin merujuk pada pendapat Ramlan Surbakti yang mengatakan bahwa sedikitnya ada 5 pendapat mengenai politik. *Pertama* politik adalah usaha-usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik ialah segala hal yang berkaitan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Dan *kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.<sup>26</sup>

Dengan demikian, etika politik mengarah pada objek pembahasan dalam lingkup pemikiran dan tindakan atau perilaku politik dalam perspektif filsafat politik.<sup>27</sup> Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia,<sup>28</sup> dengan definisi moral sebagai usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal, yakni untuk melakukan apa yang lebih baik menurut akal seraya memberi bobot yang menyangkut setiap kepentingan individu yang akan terimbas tindakan itu.<sup>29</sup> Secara eksplisit dinyatakan bahwa etika politik bertujuan untuk mengarahkan manusia pada hidup yang lebih baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil.<sup>30</sup>

Menurut al-Ghazali, etika politik dalam berbangsa dan bernegara bertolak dari pandangan bahwa agama dan kekuasaan (negara) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Al-Ghazali menganalogikan agama dan negara sebagai saudara kandung/kembar.<sup>31</sup> Bahkan al-Ghazali berpendapat bahwa keteraturan kehidupan dalam beragama sangatlah ditentukan oleh stabilitas (politik) negara.<sup>32</sup> Artinya, agama dan negara saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara dalam konteks stabilitas politik akan mendorong penerapan ajaran agama bagi pemeluknya secara baik dan maksimal, sedangkan negara membutuhkan agama dalam konteks adanya norma bernegara yang relevan dengan dasar dan prinsip dalam agama.<sup>33</sup> Meskipun Indonesia bukan negara agama (Islam), tetapi penanaman nilai-nilai Islam bisa dilakukan melalui penanaman *maqāṣid al-sharī'ah* dan nilai substansinya. Jadi makna pernyataan bahwa “Islam adalah sumber hukum nasional” bukanlah berarti hukum Islam menjadi hukum

<sup>25</sup> Joko Widodo, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 48.

<sup>26</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1992), 1-2.

<sup>27</sup> Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 62.

<sup>28</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsi-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jaakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 8.

<sup>29</sup> James Rachels, *The elements of Moral Philosophy*, Fourth Edition (New York: MacGraw-Hill Companies Inc., 1998), 40.

<sup>30</sup> Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam...*, 58-59.

<sup>31</sup> Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk fi Naṣīhat al-Mulūk* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1988), 50.

<sup>32</sup> Al-Ghazali, *al-Iqtisād fi al-I'tiqād* (Damasyqus: Dar Kotaiba, 2003), 169.

<sup>33</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulūm al-Dīn*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012), 31.



negara, melainkan nilai-nilai Islam menjadi bahan pembuatan hukum yang harus dielektikkan dengan sumber-sumber hukum yang lain, yang sesuai dengan Pancasila.<sup>34</sup>

Dalam pandangan Islam, etika politik sedikitnya ada tiga hal: (1) orientasi politik ‘*amar ma’ruf nahi munkar*, (2) etika kepemimpinan politik, dan (3) etika manajemen pemerintahan.<sup>35</sup> Ketiga elemen etika politik ini akan mengantarkan kehidupan politik yang selaras antara landasan beragama dengan landasan berbangsa dan bernegara.

## **PESANTREN MELAHIRKAN GENERASI MUSLIM MODERAT**

Dari diskusi di atas, kita telah memahami bahwa pesantren telah menjadi ujung tombak dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan peran pesantren tidak hanya dalam memajukan masyarakat melalui pendidikan, tetapi juga pesantren ikut andil secara langsung dalam menentang kolonialisme.<sup>36</sup> Pesantren di masa kemerdekaan menunjukkan responnya terhadap perubahan yang terjadi terlebih dalam sistem pendidikan. Minimal dua hal yang dilakukan oleh pesantren dalam hal ini, yakni: pertama merevisi kurikulumnya dengan memasukkan mata pelajaran umum atau bahkan keterampilan umum, dan kedua membuka kelembagaan dan fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum.<sup>37</sup> Oleh karena itu, pesantren tidak hanya menjadi transmisi transfer ilmu-ilmu Islam, pemelihara tradisi Islam, dan reproduksi ulama, melainkan pesantren bergerak pula sebagai agen perubahan dan pembangunan masyarakat.<sup>38</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pesantren terus dinamis. Dinamisasi yang dilakukan pesantren tentunya berdampak serius terhadap lahirnya para alumni pesantren dengan gaya pemikiran Islam yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi.

Di era 1970-an, pesantren harus bergumul dengan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Di antara persoalan penting yang dihadapi oleh pesantren kala itu ialah menyangkut konsep politik, di bidang pemerintahan dan kenegaraan, terutama dalam kaitannya dengan “konsep negara Islam”. Pesantren mengalami benturan antara konsep negara Islam dan negara Pancasila. Tapi di balik itu, telah muncul pemikiran untuk mendamaikan antara keislaman dan keindonesiaan.<sup>39</sup> Sehingga kalangan pesantren berhaluan moderat, dalam arti pemikiran para komunitas pesantren tidak ekstrim dalam menanggapi perbedaan pandangan mengenai konsep bernegara.

---

<sup>34</sup> Moh. Mahfud MD., “Islam, Lingkungan Budaya, dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia” dalam *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol 24, No. 1 Juni 2016, 1-14.

<sup>35</sup> Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam...*, 323-355.

<sup>36</sup> Tim Kompas, “Pesantren: Dari Pendidikan Hingga Politik” dalam Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Dian Rakyat, t.th), 133-134.

<sup>37</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014), 124.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 127.

<sup>39</sup> M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Inteligensia, dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1993), 273-291.

Bahkan kalangan santri secara fleksibel dapat memasukkan konsep negara menurut Islam dalam negara Pancasila. Bahkan lebih dari itu, menurut Arif Furchan, dalam Arief Subhan, madrasah negeri, yang *nota bene* merupakan hasil modernisasi pendidikan Islam dan pesantren, menghasilkan “Muslim Pancasila”.<sup>40</sup> Artinya, produk pendidikan Islam, pada perkembangannya, tidak lagi relevan disebut radikal, fundamental, ekstrim kiri maupun kanan, karena keterbukaan Islam Indonesia terhadap kerifan lokal hingga perubahan-perubahan global. Karena dalam konteks moderat, seorang muslim moderat adalah muslim yang menerima tradisi yang diwariskan secara turun temurun menurut kaidah Islam, serta melakukan penyesuaian dengan realitas yang ada demi tujuan yang mulia.

Begitulah yang dilakukan oleh pesantren. Pesantren saat ini tidak hanya mengenalkan santrinya tentang akidah Islam, tetapi juga mengenalkan teknologi, sehingga ilmu yang diperoleh dari pesantren tidak hanya bermanfaat bagi dirinya saja, melainkan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Mastuhu: dewasa ini hampir setiap pesantren terdapat jenis-jenis pendidikan: (1) pesantren, yang hanya mempelajari agama dengan kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning dan berbentuk non formal, (2) madrasah (sekolah agama), (3) sekolah umum, dan beberapa di antaranya (4) perguruan tinggi, baik agama maupun umum.<sup>41</sup> Sebuah jalan realistis untuk melahirkan generasi muslim moderat di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemandirian dan moderasi yang dianut pesantren dan ditekankan kepada para santri merupakan modal utama dalam mengantarkan para santri dan masyarakat sekitar menuju pembentukan masyarakat yang diinginkan (masyarakat/muslim moderat)<sup>42</sup>, keberadaan Islam Indonesia yang lebih moderat, damai, dan toleran merupakan realitas empiris-historis tak terbantahkan<sup>43</sup>, di dalamnya terdapat peran nyata dari pesantren.

## **ETIKA SEBAGAI BASIS PENDIDIKAN PESANTREN**

Segencar apapun perubahan yang terjadi di pesantren, tidak dapat mencabut pesantren dari akarnya. Pendidikan pesantren berakar pada *da'wah al-islāmiyyah* untuk memperbaiki akhlak masyarakat. Para ulama dan kiyai mengandalkan pesantren dan madrasah sebagai modal perjuangan untuk membangun moral anak bangsa.<sup>44</sup> Rangkaian trio komponen ajaran Islam yang berupa Iman, Islam, dan Ihsan atau doktrin, ritual, dan mistik telah menjadi perhatian kiai perintis pesantren sebagai isi kurikulum yang diajarkan kepada santrinya.<sup>45</sup> Pesantren tetap berpegang teguh pada kaidah *al-muhāfazatu bi al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhḍhu bi al-jadīd al-aṣlah*. Pesantren tidak pernah bergeser dari fondasi keutusan Nabi Muhammad Saw, yakni menyempurnakan *al-akhlāq al-karīmah*.

<sup>40</sup> Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Abad ke-20...*, 272-276.

<sup>41</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2006), 101.

<sup>42</sup> Abd. A'la, *Pembaruan Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 49.

<sup>43</sup> Masdar Hilmy, *Jalan Demokrasi Kita: Etika Politik, Rasionalitas, dan Kesalehan Publik...*, 85.

<sup>44</sup> Mohammad Baharun, *Islam Idealitas Islam Realitas* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 80.

<sup>45</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi...*, 109.



Pesantren mengajarkan akhlak dalam arti yang sangat luas, meskipun tidak menyebut sebagai disiplin ilmu fisafat etika, namun, pesantren mengajarkan perihal akhlak sangat tidak terbatas. Kajian dan referensi tentang akhlak sangat variatif, dari kajian tentang akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap Allah, bahkan akhlak terhadap makhluk selain manusia. Oleh karena itu, bagi seorang alumni pesantren, soal etika merupakan soal yang fundamental. Masalah etika merupakan masalah kehidupan manusia secara menyeluruh, dari unsur jasmani hingga ruhani. Begitu sakralnya substansi akhlak, sehingga salah satu pesantren memiliki prinsip: *kesopanan (akhlak) lebih tinggi nilainya dari kecerdasan*.<sup>46</sup> Salah satu bidang kajian yang mengarahkan santri kepada budi pekerti mulia adalah tasawuf.<sup>47</sup>

Dari uraian singkat di atas, dapatlah dipahami bahwa pesantren dengan segala bentuk, ragam, variasi, dinamikanya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak, budi pekerti, yang diejawantahkan dalam praktik pembelajarannya. Tidak hanya itu, pesantren akan mengukur keberhasilan para alumnya juga dengan salah satu indikator akseptabilitasnya di tengah-tengah masyarakat dalam perspektif akhlak. Hal ini sejalan dengan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepada para alumni pesantren untuk beraktualisasi diri di berbagai bidang kehidupan, dari bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang alumni pesantren telah didoktrin untuk ber-*akhlāq al-karīmah* di berbagai bidang kehidupan yang ditekuninya.

Sesuai dengan konteks kajian dalam tulisan ini, maka berikutnya penulis mencoba untuk membahas tentang etika politik dalam kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh pesantren. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa etika politik merupakan pemikiran dan atau tindakan dengan mengacu pada nilai baik dan buruk dalam konteks keikutsertaan di dalam berbangsa dan bernegara. Maka pesantren tetap *concern* pada target menghasilkan alumni yang mampu mengamalkan nilai-nilai, prinsip, konsep akhlak dalam dinamika sosial politik. Politik secara praktis, dalam arti ikut serta dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan tertentu, maupun politik dalam arti ikut serta dalam membangun masyarakat, memberdayakan masyarakat. Bahkan, pemberdayaan masyarakat di Indonesia, khususnya dalam bentuk pengembangan *civil society*, mutlak harus melibatkan pesantren.<sup>48</sup> Tidak dapat disangkal bahwa pengembangan *civil society* mesti melibatkan pesantren, karena secara embrional, pesantren telah mengemban aspek-aspek tertentu dan nilai-nilai yang ada pada *civil society*, terutama dalam menekankan kepada moralitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemandirian, kesederhanaan, dan sejenisnya.<sup>49</sup>

## **RELASI PESANTREN, ISLAM MODERAT, DAN ETIKA POLITIK**

Eksistensi pesantren di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia tak dapat dibantah, pesantren tetap memberikan kontribusinya bagi pembangunan bangsa dan ne-

---

<sup>46</sup> Slogan di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan.

<sup>47</sup> Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Dian Rakyat, t.th), 10.

<sup>48</sup> Abd. A'la, *Pembaruan Pesantren...*, 48.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 49.

gara. Pesantren terus berkiprah ikut serta mamajukan bangsa dan negara melalui berbagai bidang kehidupan, dari pertanian, industri, ekonomi, sosial, budaya hingga politik.

Dari beberapa urain di atas, penulis menemukan benang merah antara pesantren, Islam moderat, dan etika politik. Benang merah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, pesantren menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hirarki dan sistem pendidikan nasional. *Kedua*, pesantren juga telah menjadi subkultur<sup>50</sup> bagi bangsa Indonesia. *Ketiga*, pesantren melahirkan para cendekiawan muslim yang moderat, yang tidak hanya mementingkan ajaran agama demi kebutuhan individu, melainkan juga melakukan dialog antara ajaran agama dengan kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. *Keempat*, pesantren mutlak harus melibatkan diri dalam pengembangan *civil society*. *Kelima*, pesantren tetap konsisten mengedepankan prestasi dalam etika, moral, maupun akhlak, sehingga yang lahir dari pesantren adalah generasi yang dapat mengimplementasikan ajaran, nilai, prinsip, dan konsep *al-akhlāq al-karīmah* dalam kehidupan sehari-hari. *Keenam*, pada akhirnya pesantren - minimal sebagian alumninya – berkecimpung di dunia politik praktis. Mereka bersama-sama dengan yang lain ikut serta dalam perebutan, pengelolaan, hingga mempertahankan kekuasaan. Di sinilah kita temukan bahwa para warga pesantren tetap mengedepankan etika dalam berpolitik. Tanpa disiapkan sebelumnya oleh pesantren, maka sulit untuk menemukan politisi yang beretika meskipun dari kalangan pesantren.

## KESIMPULAN

Pesantren dengan segala variasinya akan tetap dibutuhkan eksistensinya, dalam rangka melanjutkan perjuangan para cendekiawan muslim Indonesia di masa lampau. Perjuangan pesantren tidak hanya dalam *da'wah tarbawiyah* saja, melainkan juga bidang-bidang kehidupan lainnya hingga *da'wah siyāsiyyah* (politik), karena pesantren melahirkan muslim moderat yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa dan negara ke depan, serta pesantren membekali generasinya dengan kompetensi dan etika politik yang kuat menurut Islam. □

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmaran, AS., *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.  
Asrahah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, 1999.  
Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014.  
A'la, Abd., *Pembaruan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.  
Baharun, Mohammad, *Islam Idealitas Islam Realitas*. Jakarta: Gema Insani, 2012.  
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: al-Hidayah, 1998.

<sup>50</sup> Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi* (Yogyakarta: Lkis, 2010), 3.





- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* – Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Fadl, Khaled Abou El, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Terj. Helmi Mustafa, Edisi ke-I. Jakarta: Serambi, 2007.
- Ghazali, Al-, *al-Tibr al-Masbūk fi Naṣīhat al-Mulūk*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1988.
- \_\_\_\_\_, *al-Iqtisād fi al-I'tiqād*. Damasyqus: Dar Kotaiba, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Ihya' Ulūm al-Dīn*, Jilid I. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012.
- Hasan, Muhammad Tholhah, *Ahlussunah Wal Jama'ah*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Hilmy, Masdar, *Jalan Demokrasi Kita: Etika Politik, Rasionalitas, dan Kesalehan Publik*. Malang Jatim: Intrans Publishing, 2016.
- Islamica Vol. 6, No. 1, September 2011.
- Karim, M. Rusli, *Dinamika Islam Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*. Yogyakarta: Hanindita, 1985.
- Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, Vol 24, No. 1, Juni 2016.
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Dian Rakyat, t.th.
- \_\_\_\_\_, *Islam Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Qomar, Mujamil, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Rachels, James, *The Elements of Moral Philosophy*, Fourth Edition. New York: MacGraw-Hill Companies Inc., 1998.
- Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual, Inteligensia, dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan, 1993.
- Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Subhan, Arif, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik: Prinsi-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2011.
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi*. Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Widodo, Joko, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.

